

“NEGARA SANTRI” Menengok Tesis Cak Nur

Oleh Hajriyanto Y. Thohari

Ketika Prof. Dr. Amien Rais terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ir. Akbar Tanjung menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan KH. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden keempat dalam SU MPR 1999, maka orang teringat pada tesis Prof. Dr. Nurcholish Madjid satu dasawarsa yang lalu bahwa Indonesia dalam perkembangannya sedang menjurus menjadi sebuah “negara santri” (Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peranan dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* [Paramadina: Jakarta, 1997], h. 61-62).

Pasalnya, ketiga tokoh tersebut adalah termasuk santri-santri *excellence*. *Pertama*, ketiganya pernah dan atau masih menjadi pimpinan puncak tiga gerakan Islam tangguh: Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Nadhlatul Ulama (NU). *Kedua*, membangun basis kepemimpinan dari gerakan Islam, bahkan gerakan Islam yang sangat tua dan berpengaruh, tetapi ketiga tokoh santri tulen ini kemudian memimpin partai-partai politik yang pluralis, sangat terbuka, dan nonsektarian, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam konteks ini maka yang menarik bukanlah soal terpilihnya ketiga tokoh santri itu, melainkan akseptabilitas publik yang begitu luas terhadap mereka. Dalam perspektif konflik santri-abangan, rasanya adalah mustahil ketiganya akan mendapatkan

penerimaan yang luas dan mulus, nyaris tanpa resistensi yang berarti, jika tidak terjadi transformasi yang kita kenal dengan santrinisasi yang telah mulai berlangsung jauh sebelumnya. Hanya karena berlangsungnya proses yang terakhir inilah dikotomi santri-abangan menjadi mencair dan tidak lagi relevan, dan karena itu skisma antara kedua segmen itu telah usai. Konflik-konflik antara keduanya yang sampai dasawarsa 70-an masih berlangsung begitu sengit, kini nyaris tiada lagi.

Proses perkembangan inilah yang pada gilirannya membawa mereka dapat diterima tanpa hambatan ideologis yang bersifat stigmatis tersebut. Maka, naiknya ketiga tokoh santri *par excellence* ke puncak kekuasaan politik yang sangat penting itu, belum lagi ditambah dengan kenyataan bahwa hampir separuh anggota Kabinet Persatuan Pembangunan datang dari mereka yang memiliki sosial origin santri, adalah memiliki relevansi dan atau harus dibaca sebagai bagian dari proses santrinisasi yang luas di negeri ini.

Proses Santrinisasi

Sebagaimana kita ketahui, sedikit berbeda dengan tradisi para ahli antropologi yang dalam mengonseptualisasikan terminologi santri cenderung eksklusif santri Jawa, Nurcholish Madjid memandang kesantrian sebagai ciri kultural seluruh penduduk Indonesia yang Muslim minus orang Jawa abangan. Artinya Jawa santri mempunyai lebih banyak unsur kesamaan kultural dengan segmen-segmen Indonesia non-Jawa yang Muslim dibandingkan dengan segmen Jawa abangan sendiri, meskipun sama-sama Jawa.

Santrinisme, bagi Cak Nur adalah lebih universal, dalam arti meliputi seluruh wilayah Indonesia, daripada abanganisme. Istilah santri menunjuk pada segmen orang Jawa yang pandangan hidupnya, secara keseluruhan, lebih kosmopolit daripada

segmen bandingannya, yakni kaum abangan. Memang ada yang menganggap “abanganisme” sebagai titik-tolak basis sekularisme modern di Indonesia, tetapi nyatanya lahan abangan semakin lama semakin sempit karena kaum abangan itu sendiri mengalami proses santrinisasi sehingga lambat laun relatif telah tersantrikan (Madjid, *ibid.*).

Proses santrinisasi ini telah berlangsung sejak lama, tetapi perkembangan yang paling mengesankan berlangsung sejak satu dasawarsa terakhir ini, yakni masa yang diakui atau tidak, kebetulan berada di bawah kepemimpinan mantan presiden Soeharto. Nurcholish Madjid mengatakan bahwa meski banyak berakibat negatif yang ditinggalkan oleh kepemimpinan Soeharto, haruslah diakui bahwa dua periode terakhir kepemimpinannya telah terjadi santrinisasi yang luas. Akibatnya kini, orang tidak lagi bicara dikotomi santri dan abangan, karena semua menjadi relatif tersantrikan (*Kompas*, Senin, 12 April 1999).

Di masa lalu, abanganisme yang pada dasarnya dijadikan basis kultural pemerintah—pemerintah dan tentara itu dulu umumnya priyayi dan abangan—terlepas dari apakah bersifat formalisme ataukah substansialisme, kini telah mengalami santrinisasi. Di Jawa, misalnya, kini tidak ada seorang pun gubernur dan bupati yang tidak bergelar haji. Fenomena seperti ini ditambah dengan fenomena raja-raja Jawa seperti Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VIII (almarhum) pergi menunaikan ibadah haji pada tahun 1990-an adalah sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan akan terjadi pada dasawarsa 70-an, bahkan 80-an sekalipun. Ketika kedua Raja Jawa ini bergelar haji dan mulai mengawali pidato-pidatonya dengan salam, itu telah cukup untuk menjadi skandal (baca: bahan pembicaraan) serius di banyak kalangan Jawa.

Dalam konteks ini ada baiknya kita menyimak pengamatan netral seorang antropolog independen yang banyak mengkaji kebudayaan Jawa, Niels Mulder, mengenai proses santrinisasi ini. *The taming of political Islam had a beneficial effect on the willingness*

of many to identify openly and actively, joining Friday prayer at the mosque, which they would have been reluctant to do formerly. Islamic study groups flourish, many students listen to the kuliah subuh... and Moslem symbolism further illustrates the pervasiveness of the Islamization process. Yogyakarta has its realm, Sri Paku Sain VIII, is careful to begin his speeches with the Arab greeting assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh, and many, more kejawen-oriented people, fear of further penetration of Islam in the kraton.

Di bagian lain Niels Mulder melanjutkan *Under the New Order, the government could penetrate and subvert the Moslem leadership, but it had in turn to make concession to certain demands that have resulted in a remarkable Islamization that is now visible in the jilbab, the new mosques and prayer houses, the popularity of the hajj, the teaching of religion state schools, the crowds at the Friday prayer, the enthusiasm for Ramadhan rituals, the craze for fast-breaking at luxury hotels, pop concert-like revival rallies, the industry of designing and propagating the Moslem new look, and the featured prominence of the president at the Istiqlal mosque on important calendar days, when the smiling general poses as eyang kakung Haji Muhammad Soeharto* (Niels Mulder, *Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java* [Amsterdam-Kuala Lumpur: The Pepin Press, 1996], h. 150-152).

Proses ini ternyata bukan hanya terjadi di kalangan pemerintah dan priyayi, melainkan juga di masyarakat luas. Lihatlah, banyak sekali desa atau komunitas yang dulu dikenal sebagai abangan dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi desa-desa santri baru yang lengkap dengan masjid-masjid atau langgar dengan pengajian-pengajiannya yang senantiasa semarak. Demikian juga kalangan menengah: kebanyakan mereka telah berubah menjadi sangat taat dalam melaksanakan ibadah sebagaimana yang diajarkan agama Islam, seperti shalat, pergi ke masjid, menghadiri pengajian, melaksanakan puasa, menunaikan haji, dan lain-lainnya, persis sebagaimana umumnya amalan sehari-hari kaum santri.

Santri Baru, Santri Lama

Akan tetapi berbeda dengan santri-santri lama yang biasanya mengidentifikasi dirinya kepada gerakan-gerakan Islam konvensional, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), atau ormas-ormas dan partai-partai Islam konvensional lainnya, maka santri-santri baru ini tidak memiliki ciri-ciri seperti itu. Santri-santri baru ini tidak mengidentifikasi dirinya kepada gerakan-gerakan Islam, apalagi yang sifatnya politis. Singkatnya, tidak NU dan tidak Muhammadiyah, meski bisa saja mereka mempraktikkan sebagian amalan-amalan keagamaan NU atau Muhammadiyah. Dan ini yang paling penting, tetap tidak berafiliasi dengan dan atau memilih partai-partai Islam dalam pemilu. Meskipun demikian mereka ini tidak fobia atau antipati kepada gerakan Islam seperti yang dulu dianut oleh kebanyakan orang-orang abangan.

Dengan kata lain, para santri baru ini tidak politis dan ideologis sebagaimana santri konvensional. Para santri konvensional cenderung sangat ideologis, politis, dan tidak pernah netral secara politik. Sementara para santri baru mengalami proses santrinisasi, minus kecenderungan sangat ideologisnya. Artinya, secara ritual mereka telah menjadi santri, tetapi secara politis tetap abangan. Demikian juga dalam hal sikap keberagamaannya, misalnya, para santri baru ini sangat saleh, bahkan seringkali lebih saleh daripada konvensional, tetapi sebagaimana biasanya orang Jawa abangan, mereka lebih toleran terhadap agama lain. Mereka memandang agama atau kepercayaan lain sebagai sesama jalan menuju Tuhan yang sama sehingga cenderung tetap lebih toleran, pluralis, dan jauh dari fanatisme.

Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa perkembangan ini pada akhirnya bertemu dengan dinamika keagamaan yang terjadi di kalangan santri lama. Kaum santri telah berkembang menjadi tidak lagi formalistik dan mementingkan simbol-simbol atau perlambang-perlambang keagamaan, melainkan lebih

mementingkan penegakan nilai-nilai atau substansi ajaran Islam yang bersifat universal, seperti keadilan, persamaan, demokrasi, penegakan hak asasi manusia, kesejahteraan, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, kaum santri yang dulunya sangat formalistik dan simbolistik, kini telah berubah menjadi semakin substantif.

Saksikan, sekarang ini tidak ada lagi tokoh Islam santri yang berani mengatakan bahwa di antara tanda kesempumaan atau kebaikan keislaman seseorang adalah menjadi anggota atau aktivis gerakan Islam formal, misalnya. Tidak ada lagi tokoh yang berani mewajibkan orang Islam untuk memilih partai-partai Islam dalam pemilu seperti dulu. Kini kita tidak mendengar sama sekali fatwa-fatwa agama semacam itu. Dan walaupun masih ada biasanya tidak lagi digubris kalau bukannya malah dijadikan bahan tertawaan.

Rahmat bagi Seluruh Alam

Muara dari dua perkembangan santrinisasi kaum abangan, dan deformalisasi kaum santri yang sangat menarik tersebut telah membentuk lanskap sosial politik (*socio-political landscape*) baru yang memungkinkan tampilnya ketiga tokoh santri yang dikenal inklusif dan nonsektarian itu ke puncak kekuasaan dengan akseptabilitas yang luas. Proses santrinisasi yang semula berlangsung mengikuti kultural atau keagamaan pada akhirnya secara alamiah dan *unintended* berhimpit dengan proses santrinisasi politik. Menyaksikan kehidupan perpolitikan nasional prolog dan epilog SU MPR 1999 yang begitu bersuasana santri agaknya tesis Cak Nur akan kesampaian juga. Minimal tidak terlalu jauh dari kebenaran.

Dalam konteks ini maka perkembangan sebagaimana tersebut di atas tidak perlu menimbulkan kekhawatiran dari pihak mana pun. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Nurcholish Madjid, dengan menjadi “negara santri” tidak berarti Pancasila terhapuskan atau tergantikan, tetapi nilai-nilai asasi Pancasila

ingat, Pancasila adalah ideologi terbuka itu akan mengejawantah atau mengaktualisasi diri melalui dan dalam bentuk nilai-nilai kesantrian yang kosmopolit dan nasional itu.

Semoga perkembangan yang sangat mengesankan ini mampu mewujudkan doktrin Islam sebagai *rahmat-an li 'l-‘alamîn*, rahmat bagi seluruh alam, tanpa membeda suku, ras, adat, dan terutama agama. Sikap diskriminatif bukan hanya tidak sesuai dengan asas demokrasi dan nilai-nilai HAM, melainkan juga sangat tidak Islami. Manis sekali, bukan? ❖